

Analisis Potensi Dan Peluang Pengembangan Wilayah Dalam Kerangka Pembentukan Daerah Otonomi Baru Luwu Tengah

Afrianto Afrianto ¹ Baharuddin Semmaila ² Mukhlis Sufri ³

Email

afirilproletar@yahoo.co.id ¹, baharuddin.semmaila@umi.ac.id ²,
mukhlis.sufri@umi.ac.id ³

Universitas Muslim Indonesia ^{1,2,3}

Abstrak: Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui potensi dengan mendorong optimalisasi dan arahan pembangunan strategis sebagai sebuah daerah persiapan yang didorong menjadi Daerah Otonomi Baru dari Kabupaten luwu. Subjek penelitian ini adalah wilayah kabupaten luwu, secara khusus pada enam kecamatan yang tergabung dalam calon DOB kabupaten luwu tengah. Jenis Penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Dari hasil penelitian ini, wilayah calon DOB Luwu tengah memiliki potensi sumber daya yang kaya di sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan yang dihitung berdasarkan analisis LQ. Produksi pada beberapa jenis komoditi di enam kecamatan telah mampu memenuhi kebutuhan pasar di wilayahnya dan mampu melakukan ekspor dalam jumlah yang cukup besar. Keterbatasan sarana dan prasarana dengan menggunakan analisis skalogram pada wilayah calon DOB luwu tengah menjadi kendala utama bagi masyarakat di wilayah ini mengakses berbagai pelayanan pemerintah dan derajat desentralisasi yang rendah dengan pola hubungan instruktif dan tingkat kemandirian keuangan yang sangat rendah

Kata kunci : *LQ, Skalogram dan keuangan daerah*

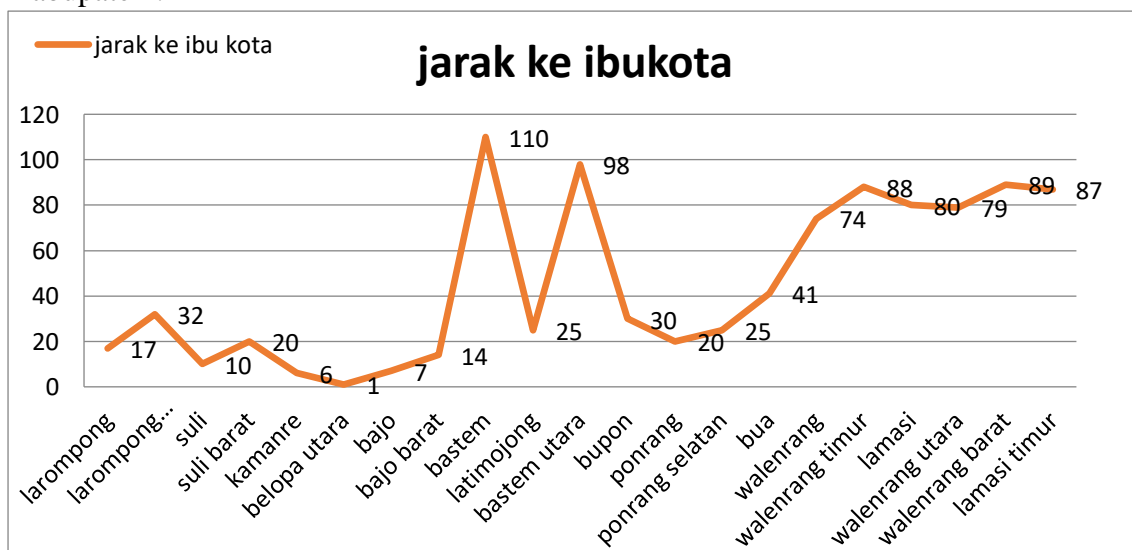
Pendahuluan

Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) adalah upaya untuk mendorong akselerasi pembangunan ekonomi di wilayah. Bukan hanya dari segi infrastruktur pemerintahan yang terbangun, tetapi juga membangun infrastruktur fisik yang menyertainya, seperti infrastruktur kebijakan pembangunan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah otonom baru. Semua infrastruktur ini diharapkan dapat membuka peluang yang lebih besar bagi wilayah hasil pemekaran untuk mengakselerasi lebih jauh pembangunan ekonominya. Diberikannya kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan di daerahnya masing – masing, menunjukkan peranan pemerintah daerah semakin penting. Pemerintahan Daerah yang membenahi hubungan pusat dan daerah memberikan kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.

Maraknya pemekaran wilayah pasca reformasi, di satu pihak perlu disyukuri karena memberikan tempat bagi aspirasi, keberagaman dan otonomi lokal. Sesuatu yang dulu diabaikan pada era orde baru. Namun dilain pihak, fenomena pemekaran wilayah secara besar-besaran tersebut sekaligus membawa masalah-masalah baru. “Setiap pemekaran akan membawa implikasi-implikasi yang luas sebagai bentuk konsekuensi logis, seperti perubahan struktur pemerintahan, anggaran belanja pemerintah, batas dan nama wilayah, pembagian sumber penerimaan dan pendapatan daerah yang sebelumnya menginduk kepada daerah asal.

Kota Palopo yang sebelumnya berstatus Kota administratif sejak 1986 dan merupakan bagian dari Kabupaten Luwu, kemudian berubah menjadi Kota pada tahun 2002 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002. Pemisahan ini nyatanya menyisahkan persoalan baru bagi daerah Kabupaten luwu, wilayah ini terbagi menjadi dua wilayah sebagai akibat dari pemekaran, yaitu wilayah Kabupaten luwu bagian selatan dan Kabupaten luwu bagian utara yang diantarai secara administratif oleh Kota Palopo.

Hal ini menjadi salah satu alasan dari tuntutan masyarakat di wilayah bagian utara untuk memisahkan diri dari Kabupaten Luwu. Jauhnya jarak ke ibukota kabupaten dengan kegiatan pemerintahan yang terkonsentrasi pada satu wilayah tertentu, mengakibatkan akses pelayanan terabaikan pada daerah yang jauh dari pusat pemerintahan, kondisi ini pun cenderung menyebabkan ketidakadilan dalam hal pembangunan sarana dan prasarana baik fisik maupun pendidikan masyarakat. Penyediaan sarana dan prasarana serta jauhnya jarak ke ibu kota Kabupaten dalam menunjang aktivitas masyarakat, akibatnya berimplikasi pada tidak maksimalnya pelayanan publik di wilayah tersebut. Calon Daerah Otonomi Baru (kabupaten Luwu Tengah) yang terdiri dari 6 (enam) Kecamatan, jika dilihat dari data BPS mengenai jarak kecamatan ke ibukota kabupaten, menunjukkan bahwa jarak yang harus ditempuh oleh masyarakat ke pusat pelayanan pemerintahan rata – rata berjarak 82 kilometer. Dari gambaran ini terlihat kecamatan walenrang barat sebagai kecamatan yang terjauh dari pusat kabupaten dengan jarak 89 km. Berikut ini data jarak kecamatan ke ibukota Kabupaten :

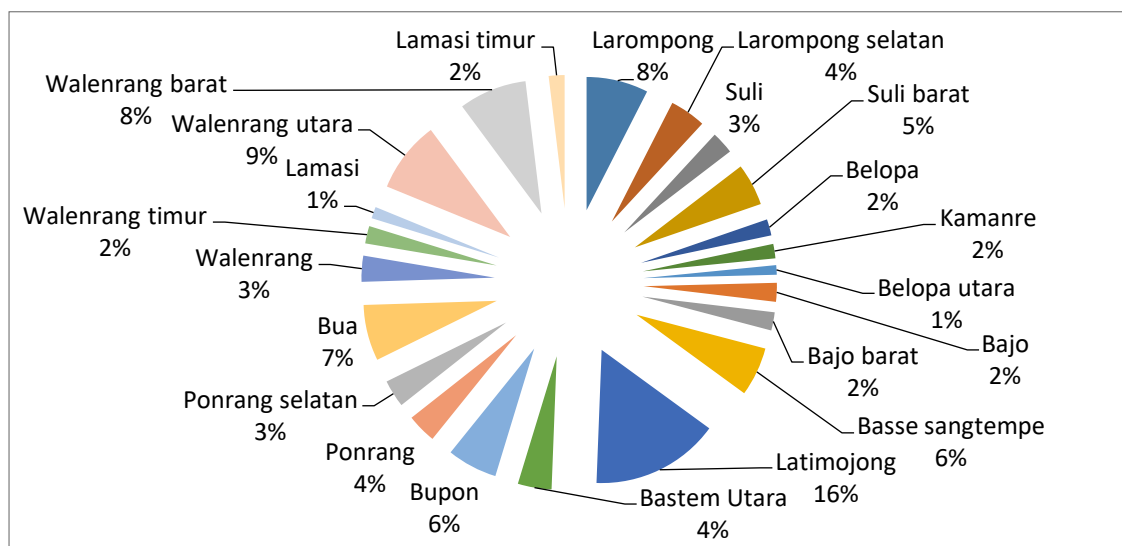


Sumber BPS Kabupaten Luwu 2018

Sjafrizal, (2018) Luas daerah dapat pula memicu tumbuhnya keinginan untuk melakukan pemekaran daerah. Alasannya adalah karena wilayah yang besar akan menyebabkan pelayanan publik tidak tepat dilakukan secara efektif dan merata ke seluruh pelosok daerah. Sementara tugas pokok pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan publik kepada seluruh masyarakat di daerahnya. Dalam rangka memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, maka salah satu cara yang dapat ditempuh adalah melakukan pemekaran daerah sehingga luas daerah menjadi lebih kecil dan jangkauan pelayanan publik menjadi lebih efektif.

Permasalahan pokok dalam pembangunan ekonomi adalah peningkatan *Gross Domestic Product* (GDP), pengurangan kesenjangan pendapatan dan penghapusan kemiskinan. Tetapi kadang menjadi sebuah dilema antara mementingkan pertumbuhan ekonomi atau mengurangi kesenjangan pendapatan dimana pertumbuhan yang tinggi belum tentu memberi jaminan bahwa kesenjangan pendapatan akan rendah. Hal ini terbukti dari banyaknya Negara Sedang Berkembang (NSB) yang mempunyai pertumbuhan (sekitar 7% per tahun), tetapi tingkat kesenjangan pendapatan dan kemiskinannya juga tinggi. Hal ini menimbulkan tuntutan untuk lebih mementingkan pengurangan kesenjangan pendapatan daripada peningkatan pertumbuhan ekonomi (Sudarmono, 2006).

Berikut gambaran Luas Wilayah Kabupaten Luwu

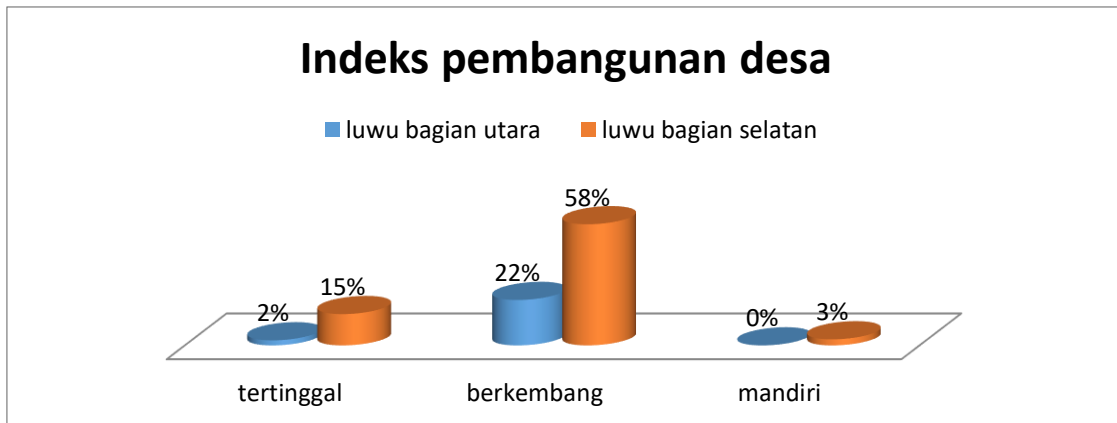


Sumber; BPS Kabupaten Luwu dalam angka tahun 2018

Sebagai Kabupaten dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 227 yang memiliki kondisi geografis yang berbeda, kondisi pembangunan tiap desa pun berbeda – beda. Di Kabupaten luwu masih terdapat desa tertinggal dan hanya sebagian desa yang masuk kategori mandiri. Berdasarkan perhitungan IPD tahun 2018 untuk mengetahui tipologi di tiap desa. BAPPENAS, (2015) menguraikan bahwa Indeks pembangunan desa adalah indeks komposit yang disusun menggunakan beberapa dimensi, variabel, dan indikator

kuantitatif. IPD diukur secara berkala dan ditampilkan antar waktu, maka dapat diperoleh dinamika dan perubahan tingkat kemajuan desa. Dinamika dan perubahan tingkat kemajuan desa secara tidak langsung merupakan ukuran kinerja pembangunan di desa atau kawasan perdesaan.

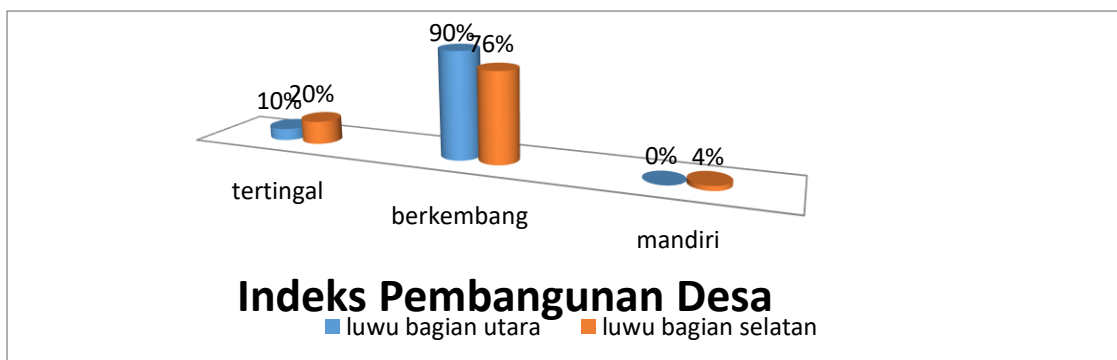
Berdasarkan data Indeks pembangunan desa yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu padatahun 2018, terlihat masih terdapat 36 desa tertinggal yang tersebar di beberapa kecamatan, terdapat 163 desa masuk kategori desa berkembang dan hanya terdapat 6 desa mandiri.



Sumber BPS Kabupaten Luwu tahun 2018 (diolah)

Secara terpisah, masih terdapat 5 (lima) desa tertinggal di wilayah utara Kabupaten luwu dan tidak terdapat desa mandiri, 6 (enam) desa yang masuk kategori desa mandiri semuanya berada di wilayah bagian selatan Kabupaten luwu. Penyediaan sarana dan prasaran sarana dan parasarana pada calon DOB luwu tengah masih belum memadai, terlihat dari data BPS kecamatan dalam angka menunjukkan beberapa kecamatan masih belum tersedianya pelayanan pendidikan, kesehatan dan pelayana ekonomi sehingga kegiatan sosial ekonomi masih terkonsentrasi pada kecamatan tertentu, khususnya pada kecamatan walenrang barat yang masih membutuhkan pengadaan infrastuktur.

Berikut ini persentase perbandingan antara Kabupaten luwu bagian utara yang dilihat secara terpisah dengan wilayah Kabupaten luwu bagian selatan.



Sumber BPS Kabupaten Luwu tahun 2018 (diolah)

Sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk di 220 desa/kelurahan di Kabupaten luwu adalah sektor pertanian, dimana terdapat 150 desa/kelurahan diantaranya bekerja pada subsektor padi. Berdasarkan data statistik (BPS Kabupaten luwu tahun 2017) sebanyak 89,44 % dikelola sebagai lahan pertanian. Terdapat lahan sawah 38.929,06 Ha, Lahan bukan sawah 229.425,3 ha dan lahan non pertanian seluas 31.670,1 ha. Jika melihat secara terpisah data ini, secara keseluruhan wilayah Kabupaten luwu bagian utara yang terdiri dari 6 kecamatan memiliki luas wilayah 765 Km² atau 25,5 % dari total luas wilayah 3000,25 Km², daerah – daerah tersebut menggarap sekitar 41 % dari luas lahan sawah 38.929,6 ha. Bahkan, jika dirinci per kecamatannya, kecamatan walenrang utara sebagai daerah yang paling luas mengelolah lahan pertanian dengan dengan luasan sawah 3.540,2 ha, luas lahan bukan sawah (Dry land) 19779,3. Kecamatan walenrang utara juga memiliki luas lahan bukan pertanian yang paling luas dari seluruh kecamatan di Kabupaten luwu seluas 2657,5 ha.

Sejalan dengan itu, berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi yang menjadi indikator utama dalam menggambarkan perekonomian suatu wilayah, selama lima tahun terakhir, peranan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan Kabupaten luwu memberikan kontribusi besar yaitu rata – rata di atas 50 %. Ini menunjukkan bahwa basis perekonomian dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dari tahun ke tahun belum bergeser.

Tabel 1. Distribusi persentase PDRB Kabupaten Luwu atas harga dasar berlaku menurut lapangan usaha tahun 2018.

Lapangan Usaha	2016	2017	2018
Pertanian, kehutanan dan perikanan	54.3	53.5	53.83
Pertambangan dan penggalian	2.76	2.77	2.75
Inndustri pengolahan	4.02	4.16	4.13
Pengadaan listrik dan gas	0.07	0.08	0.08
Pengadaan air,pengolahan sampah, limbah dan daur ulang	0.01	0.01	0.01
Konstruksi	8.03	8.18	8.11
Perdagangan besar dan eceran; Reparasi mobil dan sepeda motor	9.91	9.78	9.76
Transportasi dan pergudangan	0.82	0.8	0.84
Penyediaan akomodasi dan makan minum	0.69	0.67	0.7
Informasi dan komunikasi	2.11	2.1	2.09
Jasa keuangan dan asuransi	1.43	1.44	1.4

Real estate	5.76	5.83	5.69
Jasa perusahaan	0.02	0.03	0.03
Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib	4.64	4.53	4.36
Jasa pendidikan	3.38	3.34	3.41
Jasa kesehatan dan kegiatan social	1.76	2.49	2.49
Jasa lainnya	0.29	0.29	0.31
Total	100	100	100

Dilihat dari nilai PDRB di atas yang ditopang oleh pertanian, kehutanan dan perikanan. Sektor ini menjadi penunjang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu dari tahun ke tahun. Namun, jika dilihat dari tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu berdasarkan data BPS tahun 2018 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas menurut sektor bekerja masih didominasi bekerja di sektor pertanian sebesar 32,62 %, sedangkan penduduk usia 15 tahun ke atas bekerja bukan di sektor pertanian sebesar 20,75 %. Selebihnya adalah tidak bekerja sebesar 46,63 %.

Tabel 2. Persentase penduduk miskin 15 tahun keatas menurut sektor bekerja

Kabupaten/Kota	Tidak Bekerja	Bekerja Bukan di Sektor Pertanian (%)	Bekerja di Sektor Pertanian (%)
Kabupaten Luwu	46,63	20,75	32,62
Prov.Sul-sel	45,08 %	20,32 %	34,60 %

Sumber BPS kabupaten luwu tahun 2018

Data ini juga menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu jika dibandingkan dengan seluruh kabupaten/kota yang ada di provinsi Sulawesi selatan, Kabupaten Luwu berada pada peringkat ke empat dari 22 kabupaten/kota. Data ini menunjukkan tidak berkorelatif dengan potensi pertanian yang ada dengan keadaan tingkat kemiskinan yang tinggi pada pekerja di sektor pertanian.

Menurut Sudarsih, (2008), kebijakan dan strategi industrialisasi yang diterapkan kedepannya harus memperhatikan sektor pertanian sebagai salah satu keunggulan komparatif yang dimiliki. Penyebab utama yang mendorong timbulnya ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah adanya perbedaan yang sangat besar dalam kandungan sumber daya alam pada masing-masing daerah. Perbedaan kandungan sumber daya alam ini jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah yang bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam yang tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah jika dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam yang lebih rendah. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan sumber daya alam tinggi lebih tinggi jika dibanding dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam yang lebih rendah (Prasetya dan Tasik, 2017).

Analisis Potensi Dan Peluang Pengembangan Wilayah.. -

Perkembangan Kota yang semakin maju, pengembangan agropolitan perlu diposisikan secara sinergis dalam sistem pengembangan wilayah. Pengembangan kawasan agropolitan bertujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pembangunan wilayah dan peningkatan keterkaitan desa dan Kota dengan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing. Sasaran pengembangan kawasan agropolitan adalah untuk mengembangkan kawasan pertanian yang berpotensi menjadi kawasan agropolitan.

Keuangan daerah juga merupakan salah satu faktor penting melihat kemampuan Kabupaten induk dalam mendorong Daerah Otonomi Baru. Secara nyata diperlukan merubah pola belanja aparatur dan pembangunan di Kabupaten setempat sehingga dalam jangka pendek akan menciptakan permintaan barang dan jasa yang dapat mendukung terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pola belanja aparatur juga diarahkan secara langsung dalam rangka peningkatan pelayanan publik, baik secara fisik maupun non fisik. Sehingga dalam jangka panjang keuangan pemerintah sendiri akan meningkatkan optimalisasi pendapatan dan kemandirian fiskal (BAPPENAS bekerja sama dengan UNDP, 2007).

Alokasi keuangan pada daerah persiapan pembentukan Daerah Otonomi Baru merupakan stimulus untuk merangsang aktivitas ekonomi dan ketersediaan infrastruktur, hal ini sebagai upaya untuk meminimalisir berbagai persoalan pembangunan kedepannya. Bantuan Pemerintah Pusat melalui mekanisme Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah konsekuensi dari desentralisasi fiskal.

Dalam konteks pendanaan desentralisasi, hal yang sangat krusial untuk dilihat adalah efektivitas dana yang semakin besar bergulir ke daerah yang dibelanjakan oleh daerah dan dampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dipengaruhi oleh kebijakan belanja masing-masing pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, dana perimbangan harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh karena masing-masing komponen mempunyai tujuan yang saling melengkapi satu dengan lainnya. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan instrumen untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan daerah. Disadari bahwa instrumen DBH tersebut menimbulkan kesenjangan fiskal antar daerah karena adanya variasi sumber daya antar daerah. Oleh karena itu, instrumen Dana Alokasi Umum (DAU) ditujukan untuk mengurangi kesenjangan antar daerah. Di samping itu, untuk membantu daerah dengan kemampuan keuangan yang relatif rendah, dialokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung pencapaian tujuan dan prioritas nasional serta meningkatkan pemerataan akses terhadap layanan publik. Oleh karena itu, mendorong pemekaran suatu daerah menjadi Daerah Otonomi Baru, harus memperhatikan berbagai aspek pendukung pengembangan daerah terutama aspek sumber daya alam atau sumber ekonomi suatu daerah dan sumber daya manusia yang akan mengelolanya.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka hipotesis penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

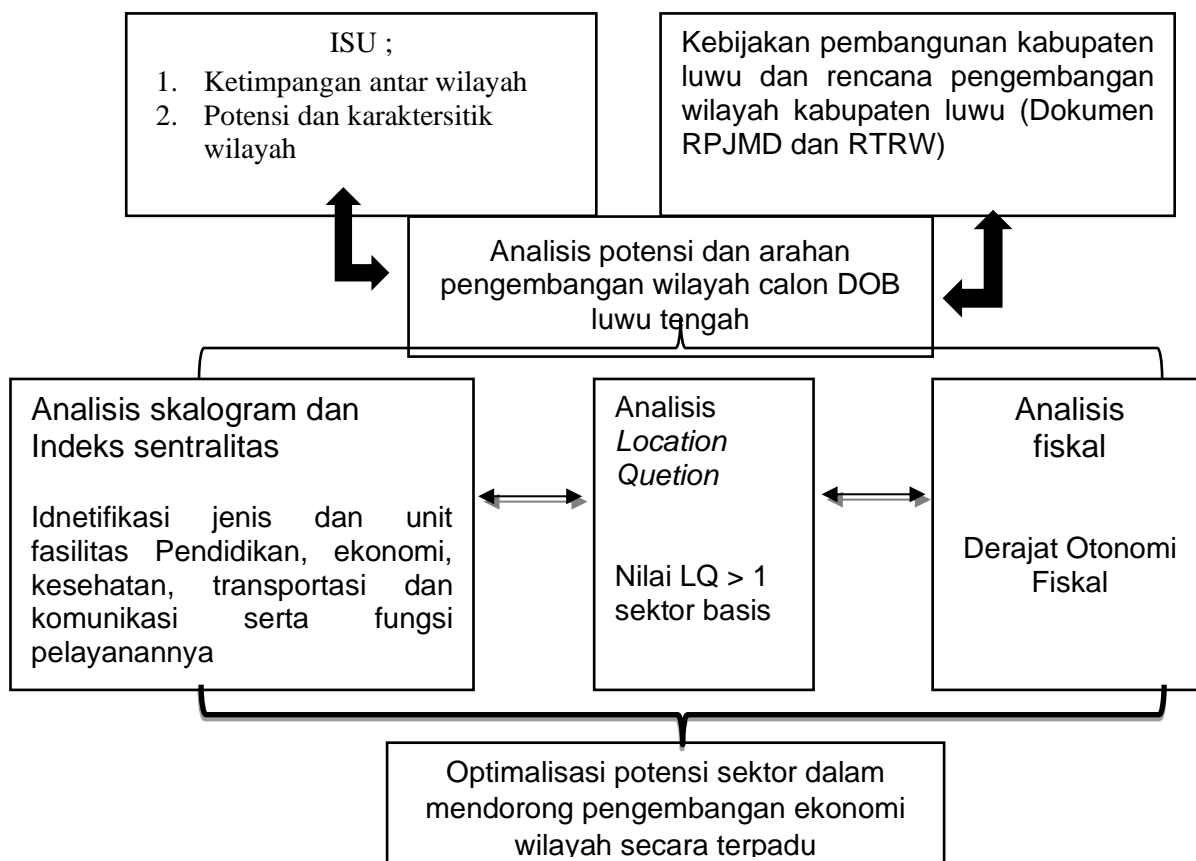
H₁: Calon DOB Kabupaten Luwu tengah memiliki wilayah yang luas dan juga memiliki potensi ekonomi yang dapat dijadikan sebagai sektor unggulan dalam mendorong pembangunan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan.

H₂: Ketersediaan, fungsi dan penyebaran sarana dan prasarana pelayanan pada calon DOB luwu tengah belum sepenuhnya merata.

H₃: Kabupaten Luwu sebagai Kabupaten induk yang mendorong pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten luwu tengah belum memiliki derajat desentralisasi dan kemandirian fiskal yang baik.

H₄: Calon DOB luwu tengah memiliki wilayah strategis dan dapat dioptimalisasi sebagai wilayah pengembangan ekonomi untuk mendukung kemandirian wilayah calon DOB luwu tengah.

Tabel. 3. Kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat dilihat pada diagram di bawah ini



Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah Deskriptif kuantitatif . Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Luwu. Sumber data yang diperoleh data primer dan data sekunder, Data primer diperoleh melalui wawancara dengan nara sumber dari instansi terkait. Data sekunder diperoleh melalui metode riset pustaka dan metode riset dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan informasi melalui sumber dari laporan pemerintah seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Luwu, Bappeda, Dinas Pendapatan

Daerah, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan data dari berbagai laporan dan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan.

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang juga didukung dengan sumber informasi melalui metode wawancara dengan unsur pemerintahan. Metode analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui Kondisi kabupaten luwu dan calon DOB kabupaten luwu tengah serta tingkat perkembangan hasil pembangunannya. Metode kuantitatif antara lain berupa analisis hierarki pusat pertumbuhan dan pelayanan dengan metode skalogram dan indeks sentralitas, metode *Location Quotient* (LQ) dan derajat otonomi fiskal.

Analisis Data Dan Pembahasan

Metode *Location Quotient* (LQ)

Untuk mengetahui potensi aktivitas ekonomi yang merupakan sektor basis dan non-basis dapat digunakan metode *location quotient* (LQ), rumusnya adalah sebagai berikut :

$$LQ_{ij} = X_{ij} / RV_j / X_i / RV$$

dimana

LQ_{ij} = Indeks/koeffisien *Location Quotient* sektor I di kecamatan J

X_{ij} = total produksi sektor i di kecamatan j

X_i = produksi sektor i di Kabupaten (acuan)

RV_j = Total produksi kecamatan j

RV = Total produksi Kabupaten j

Metode Skalogram dan Indeks Sentralitas

1. Skalogram

Analisis skalogram pada umumnya dipergunakan untuk menganalisis pusat-pusat permukiman, khususnya hirarki atau orde pusat-pusat permukiman. Analisis ini untuk memberikan gambaran adanya pengelompokkan permukiman sebagai pusat pelayanan dengan mendasarkan pada kelengkapan fungsi pelayanannya.

2. Indeks sentralitas

Indeks sentralitas pada penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui struktur/hierarki pusat-pusat pelayanan yang ada dalam suatu wilayah perencanaan pembangunan, seberapa banyak fungsi pelayanan pada setiap sarana dan prasarana yang ada, berapa jenis fungsi dan berapa jumlah penduduk yang dilayani serta seberapa besar frekuensi keberadaan suatu fungsi dalam satu satuan wilayah permukiman.

Analisis kemampuan keuangan daerah

Dalam menganalisis kemampuan keuangan daerah, beberapa analisis rasio keuangan yang dapat dibuat yaitu :

a. Derajat desentralisasi

Derajat Desentralisasi = Pendapatan Asli Daerah/Total Pendapatan Daerah X 100%

Ratio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD semakin tinggi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi, berikut ini klasifikasinya :

Tabel 4. Derajat Desentralisasi

Persentase (%)	kriteria derajat desentralisasi
0,00 – 10,00	Sangat kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01- 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
> 50	Sangat baik

Sumber ; Tim Litbang Depdagri

b. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian = Pendapatan Asli Daerah/(Transfer Pusat+Propinsi+ Pinjaman) X100 % Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangannya

Tabel 5. Rasio Kemandirian Daerah

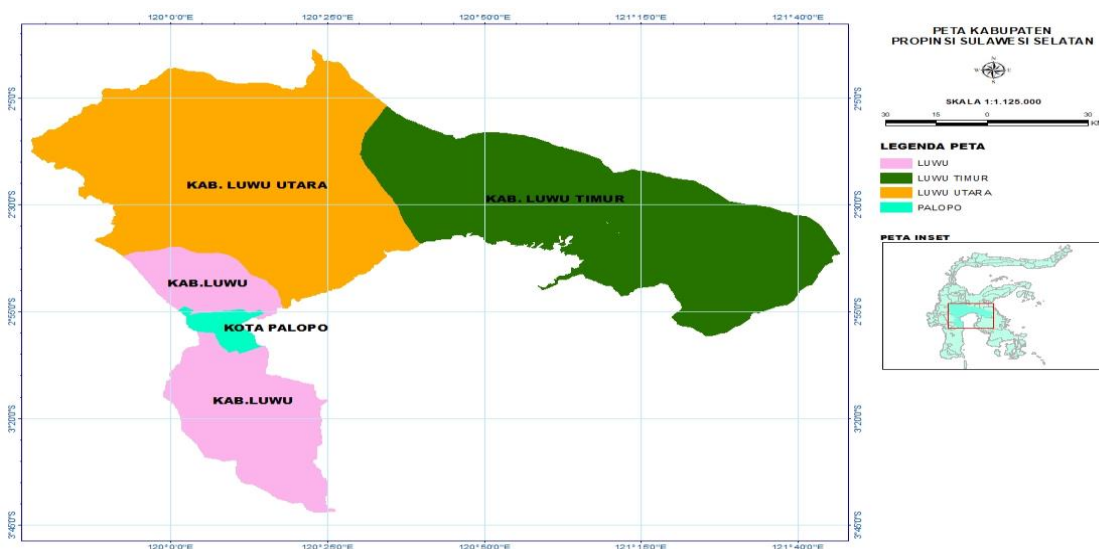
Kemampuan keuangan	Kemandirian (%)	Pola hubungan
Rendah sekali	0 %- 25 %	Instruktif
Rendah	25 % - 50 %	Konsultatif
Sedang	50 % - 75 %	Partisipatif
Tinggi	75 % - 100 %	Delegatif

Sumber, halim (2011)

Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Geografis dan iklim

Peta Wilayah Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan



Pada peta tersebut menunjukkan jika Daerah Kabupaten Luwu terbagi dua wilayah sebagai akibat dari pemekaran Kota Palopo, yaitu wilayah Kabupaten Luwu bagian selatan dan bagian utara dari Kota Palopo (Calon DOB Luwu tengah), BPS Kabupaten Luwu (2018).

Tabel 6. Keadaan geografis Kabupaten Luwu berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk dan jarak ke ibu kota

Kecamatan	Luas wilayah	Jumlah penduduk	Jarak ke ibukota
Larompong	225,25	20708	17
larompong selatan	131	16216	32
Suli	81,75	19120	10
suli barat	153,5	9265	20
Belopa	59,26	17629	Ibu kota
Kamanre	52,44	11901	6
belopa utara	34,73	17138	1
Bajo	68,52	16004	7
bajo barat	66,3	10682	14
Bastem	178,12	7273	110
Latimojong	467,75	5628	25
bastem utara	122,88	8518	98
Bupon	182,67	14583	30
Ponrang	107,09	27419	20
ponrang selatan	99,98	24776	25
Bua	204,01	35759	41

2. Sumber Daya Manusia.

Tabel 8. Indeks Pembangunan Manusia kabupaten Luwu

Komponen	2017	2018
Angka Harapan Hidup	69,60	69,84
Harapan Lama Sekolah	13,28	13,30
Rata –rata lama sekolah	7,89	7,97
Purchasing power parity	9.381	9.705
Indeks kesehatan	76,31	76,68
Indeks HLS	73,78	73,89
Indeks RLS	52,60	53,13
Indeks Pendidikan	63,19	63,51
Indeks Pengeluaran	68,18	69,22
IPM	69,02	69,60

Sumber ; BPS Kab.luwu tahun 2018

Deskripsi Hasil Penelitian

1. Hasil perhitungan LQ

Tabel 9. Distribusi PDRB tahun 2014 -2018

Lapangan Usaha	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha				
	2014	2015	2016	2017	2018
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	53.22	53.55	54.3	53.5	53.83
B. Pertambangan dan Penggalian	2.65	2.74	2.76	2.77	2.75
C. Industri Pengolahan	4.24	4.1	4.02	4.16	4.13
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.08	0.06	0.07	0.08	0.08
E. Pengadaan Air	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
F. Konstruksi	8.64	8.28	8.03	8.18	8.11
G. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.26	10.22	9.91	9.78	9.76
H. Transportasi dan Pergudangan	0.77	0.85	0.82	0.8	0.84
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.71	0.69	0.69	0.67	0.7
J. Informasi dan Komunikasi	2.26	2.21	2.11	2.1	2.09
K. Jasa Keuangan	1.37	1.38	1.43	1.44	1.4
L. Real Estate	5.97	5.85	5.76	5.83	5.69
M,N. Jasa Perusahaan	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4.68	4.75	4.64	4.53	4.36
P. Jasa Pendidikan	3.17	3.27	3.38	3.34	3.41
Q. Jasa Kesehatan	1.64	1.73	1.76	2.49	2.49
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0.27	0.28	0.29	0.29	0.31
Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100

BPS kabupaten luwu

Berdasarkan hasil perhitungan LQ di kabupaten luwu, dengan merujuk pada data Badan Pusat Statistik kabupaten luwu dalam angka menurut harga berlaku periode 2016 - 2018, terdapat empat sektor yang masuk kategori sektor basis yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pengadaan listrik dan gas, real estate dan jasa kesehatan.

Tabel 10. Perhitungan LQ pada semua sektor:

LAPANGAN USAHA	TAHUN		
	2016	2017	2018
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.32	2.31	2.39
Pertambangan dan Penggalian	0.53	0.56	0.56
Industri Pengolahan	0.29	0.30	0.32

Analisis Potensi Dan Peluang Pengembangan Wilayah.. -

Pengadaan Listrik dan Gas	1.13	1.25	1.23
Pengadaan Air	0.13	0.13	0.13
Konstruksi	0.64	0.63	0.60
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.75	0.71	0.68
Transportasi dan Pergudangan	0.19	0.19	0.20
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.52	0.49	0.50
Informasi dan Komunikasi	0.45	0.44	0.42
Jasa Keuangan	0.38	0.38	0.37
Real Estate	1.46	1.53	1.54
Jasa Perusahaan	0.06	0.06	0.06
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.04	1.04	0.98
Jasa Pendidikan	0.67	0.64	0.65
Jasa Kesehatan	0.90	1.27	1.25
Jasa Lainnya	0.22	0.22	0.22

Tabel 11. LQ sektor pertanian calon DOB Luwu tengah

TANAMAN PANGAN DAN PALAWIJA	PRODUKSI LUWU TENGAH	PRODUKSI KAB.LUWU	LQ
PADI	179,336	369,115	1.13
JAGUNG	3,293	51,060	0.15
UBI KAYU	112	1,604	0.16
UBI JALAR	32	1,793	0.04
KACANG TANAH	0	53	0.00
KACANG HIJAU	0	70	0.00
KEDELAI	0	126	0.00
TOTAL PRODUKSI	182,773	423,821	

Sumber BPS kabupaten luwu tahun 2019, diolah

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari 17 sektor yang dianalisis, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi sektor basis dengan nilai tertinggi 2,39. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini memiliki derajat spesialisasi pembangunan di kabupaten luwu, sektor ini sangat surplus sehingga memungkinkan untuk melakukan ekspor produknya ke daerah – daerah lain.

Berdasarkan hasil perhitungan LQ pada tabel tersebut untuk komoditi tanaman pangan dan palawija di wilayah Calon DOB luwu tengah, produksi tanaman pangan dan

palawija yang memiliki nilai $LQ \geq 1$ adalah tanaman padi dengan nilai LQ adalah 1.13. Selebihnya, dari 7 jenis komoditi yang dihitung LQ nya tidak dikategorikan sebagai sektor basis/ unggulan di wilayah DOB luwu tengah.

Tabel 12. LQ pada sektor perkebunan

PERKEBUNAN	PRODUKSI LUWU TENGAH	PRODUKSI KAB.LUWU	LQ	KETERANGAN
KELAPA DALAM	368	3,732	1.12	BASIS
KELAPA HIBRIDA	0	192	0.00	NON BASIS
KOPI	506	2,375	2.42	BASIS
CENGKEH	343	8,004	0.49	NON BASIS
PALA	0	27	0.00	NON BASIS
COKLAT	1,915	24,260	0.90	NON BASIS
LADA	6	276	0.25	NON BASIS
SAGU	322	882	4.15	BASIS
AREN	79	170	5.29	BASIS
JAMBU MENTE	1	346	0.03	NON BASIS
TOTAL PRODUKSI	3,540	40,264		

Tabel 13. Perhitungan LQ perikanan calon DOB Luwu tengah

PERIKANAN	PRODUKSI LUWU TENGAH	PRODUKSI KAB.LUWU	LQ
PERIKANAN BUDIDAYA	117,231	325,087	1.05
PERIKANAN TANGKAP	142	17,379	0.02
TOTAL PRODUKSI	117,373	342,466	

Sumber BPS kab.luwu tahun 2019, diolah

Tabel 14. Perhitungan LQ peternakan calon DOB Luwu tengah

PETERNAKAN	PRODUKSI LUWU TENGAH	PRODUKSI KAB.LUWU	LQ
SAPI POTONG	8,136	16,385	1.65
KERBAU	2,272	5,454	1.38
KAMBING	4,268	14,408	0.98
BABI	6,996	13,783	1.69
ITIK	82,810	199,661	1.38

AYAM	291,252	1,065,606	0.91
TOTAL PRODUKSI	395,734	1,315,297	

Sumber BPS kab.Luwu tahun 2019

Analisis Skalogram Dan Indeks Sentralitas

Ketersediaan sarana pelayanan pada calon DOB luwu tengah (Skalogram)

Tabel 15. perhitungan skalogram

Kecamatan	jumlah fasilitas					Total
	Pendidikan	Kesehatan	Ekonomi	ibadah/ social	Perhubu Ngan	
W. Timur	5	4	2	3	0	14
W. Utara	4	5	3	4	0	16
Walenrang	7	6	4	4	0	21
W. Barat	3	4	0	4	0	11
Lamasi	9	7	4	4	1	25
L. Timur	5	3	3	3	0	14
Belopa	8	7	3	5	0	23
Belopa Utara	7	8	4	5	2	26
Bupon	9	4	4	2	0	19
Bua	6	6	4	4	0	20
Kamanre	6	6	3	4	0	19
Ponrang	8	6	4	3	1	21
ponrang selatan	9	6	3	3	0	21
Suli	8	6	4	5	0	23
Suli barat	8	4	3	3	0	18
Larompong	8	7	3	6	0	24
Larompong Selatan	7	7	3	5	0	22
Bajo	9	6	4	4	2	25
Bajo Barat	7	5	0	3	0	15
Bastem	3	4	1	2	0	10
Bastem Utara	4	4	2	2	0	12
Lantimojong	6	4	2	4	0	14

Tabel 16. Hasil range orde skalogram

Range	Nilai
Orde 1	22.8 – 26
Orde 2	19.5 - 22,7
Orde 3	16.2 – 19,4
Orde 4	12.9 – 16.1
Orde 5	≤12,8

Dari hasil perhitungan skalogram ditemukan jumlah error yang didapati dari 22 kecamatan (N) dan 16 fasilitas (k) di kabupaten luwu. Dengan demikian, untuk menghitung COR adalah sebagai berikut.

$$\text{COR} = 1 - \frac{\sum e}{N \times K}$$

$$\text{COR} = 1 - \frac{16}{22 \times 16}$$

$$\text{COR} = 1 - 0,0625$$

$$\text{COR} = 0,94$$

Berdasarkan ketentuan dari nilai COR yang layak untuk dianalisis adalah bernilai $\geq 0,9$. Dari hasil perhitungannya tersebut yang nilai COR nya adalah 0,94 menunjukkan data tersebut layak dilanjutkan untuk dianalisis.

Dari hasil perhitungan range orde skalogram yang terbagi menjadi 5 kelompok, terdapat 6 (enam) kecamatan yang berada di orde satu atau memiliki keberadaan fasilitas yang paling tinggi, terdapat 7 (tujuh) kecamatan pada orde II, orde III terdapat 2 (dua) dikecamatan, orde IV terdapat di 4 (empat) kecamatan dan terdapat 3 (tiga) kecamatan di orde V atau ketersediaan fasilitas yang sangat rendah. Dari tabel ini, calon DOB Luwu tengah hanya terdapat satu kecamatan yang masuk dalam orde I, yaitu kecamatan lamasi. Orde II di kecamatan walenrang, orde III terdapat di kecamatan walenrang utara, walenrang timur berada di orde IV, sementara kecamatan walenrang barat menempati orde ke V. Berikut tabel pembagian orde masing – masing kecamatan.

Tabel 17. Orde per kecamatan

Kecamatan	jumlah jenis fasilitas	Orde
Walenrang Timur	14	IV
Walenrang Utara	16	III
Walenrang	21	II
Walenrang Barat	11	V
Lamasi	25	I
Lamasi Timur	14	IV
Belopa	23	I
Belopa Utara	26	I
Bupon	19	II
Bua	20	II
Kamanre	19	II
Ponrang	21	II
ponrang selatan	21	II
Suli	23	I
Suli barat	18	III
Larompong	24	I
Larompong Selatan	22	II
Bajo	25	I
Bajo Barat	15	IV

Bastem	10	V
Bastem Utara	12	V
Lantimojong	14	IV

Indeks Sentralitas

Tabel 18. interval dan hirarki indeks sentralitas

Interval IS	Hirarki
259.26 - 313.37	I
205.14 - 259.25	II
151.02 - 205.13	III
96.9 - 151.01	IV
42.69 - 96.8	V

Tabel 19. Perbandingan orde skalogram dan Indeks sentralitas (hirarki fungsi pelayanan sarana dan prasarana)

Kecamatan	Orde skalogram	Nilai IS	Hirarki IS
Walentrang Timur	IV	72.76	V
Walentrang Utara	III	86.62	V
Walentrang	II	125.07	IV
Walentrang Barat	V	53.83	V
Lamasi	I	187.85	III
Lamasi Timur	IV	75.37	V
Belopa	I	232.88	II
Belopa Utara	I	313.37	I
Bupon	II	123.91	IV
Bua	II	117.38	IV
Kamanre	II	112.26	IV
Ponrang	II	155.92	III
ponrang selatan	II	130.84	IV
Suli	I	158.49	III
Suli barat	III	101.53	V
Larompong	I	199.51	III
Larompong Selatan	II	156.91	III
Bajo	I	221.18	II
Bajo Barat	IV	97.38	IV
Bastem	V	42.82	V
Bastem Utara	V	53.14	V
Lantimojong	IV	81.32	V

Derajat penyebaran sarana dan prasarana pembangunan

Tabel 20. Derajat penyebaran dan Peringkat unit

Fasilitas	jumlah kecamatan	derajat penyebaran	jumlah unit	Peringkat
Masjid	22	100	717	1
Posyandu	22	100	418	2
Pertokoan	18	82%	328	3
Gereja	19	86%	285	4
Sekolah Dasar	22	100%	279	5
TK	22	100%	243	6
Mushollah	19	86%	151	7
Poskesdes	20	91%	117	8
Pustu	22	100%	112	9
SLTP	22	100%	103	10
objek wisata	15	68%	75	12
Koperasi	14	64%	72	11
Pasar	19	86%	52	13
Apotek	12	55%	52	14
dokter praktek	13	59%	39	15
Madrasah Ibtidaiyah	15	68%	33	16
Raudathul Athfal	9	41%	32	17
MTS	15	68%	28	18
SMA	9	68%	24	19
SMK	14	64%	23	20
PUSKEMAS	22	100%	22	21
Praktek Bidan	6	27%	18	23
BANK	10	50%	17	22
Madrasah Aliyah	10	45%	11	24
Wisma	5	23%	11	25
Hotel	3	14%	6	26
kantor pos	4	18%	4	27
terminal bus	2	9%	2	28
Rumah Sakit	2	9%	2	29
Pura	0	0	0	30
Vihara	0	0	0	31

BPS kabupaten luwu tahun 2019, diolah

Derajat desentralisasi

Tabel 21. Hasil perhitungan derajat Desentralisasi

Tahun	PAD	Total pendapatan daerah	Ratio derajat desentralisasi	Kriteria
2016	99.599.020.129	1.407.134.199.113	7.08 %	Sangat kurang
2017	106.797.938.000	1.283.399.539.380	8.32 %	Sangat kurang
2018	109.956.013.141	1.340.510.284.241	8.20 %	Sangat kurang
Rata –rata			7.87 %	Sangat kurang

Data 3 tahun yang dijabarkan pada tabel tersebut, menunjukkan bahwa kemampuan keuangan pemerintah kabupaten luwu tergolong sangat kurang. Hal ini berarti bahwa pemerintah kabupaten luwu belum mampu membiayai pengeluarannya sendiri.

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 22. Hasil perhitungan rasio kemandirian daerah

Tahun	PAD	Transfer pusat, provinsi + pinjaman	Ratio kemandirian daerah	Kriteria
2016	99.599.020.129	1.307.534.270.004	8 %	Instruktif
2017	106.797.938.000	1.176.601.601.380	9 %	Instruktif
2018	109.956.013.141	1.230.554.271.100	9 %	Instruktif
Rata –rata			9 %	Instruktif

Sumber ; APBD kabupaten Luwu tahun 2016-2018.

Pembahasan

Potensi ekonomi dari hasil perhitungan LQ

Wilayah calon DOB luwu tengah yang memiliki sumber daya unggulan pada beberapa jenis komoditi dan produktifitas yang besar jika dilihat terpisah dengan 6 (enam) kecamatan yang berada di wilayah calon DOB luwu tengah dengan 16 kecamatan yang ada kabupaten luwu. Disimpulkan bahwa potensi ekonomi pada wilayah ini mempunyai peran penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat di wilayah luwu tengah. Optimaliasasi potensi sektor –sektor ini akan memberikan pengaruh pada sektor lain dalam rangka menunjang aktivitas sektor lain seperti jasa dan perindustrian.

Potensi Besar yang dimiliki wilayah ini akan lebih menunjang kemajuan pembangunan daerah ini jika dikembangkan sebagai spot hilirisasi industri pertanian dengan bentuk agroindustri

Ketersediaan, fungsi dan Penyebaran pusat Pelayanan calon DOB Luwu tegah

Penyebaran sarana dan prasarana di setiap wilayah akan memberi kemudahan dan kelancaran akses pada semua bidang. Ketersediaan infrastuktur menjadi daya dukung

aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dari data ketersediaan sarana dan prasarana dari hasil perhitungan skalogram di wilayah calon DOB Luwu tengah, hanya terdapat 2 kecamatan yang memiliki jenis fasilitas dengan jumlah tinggi (orde I) yaitu kecamatan lamasi dengan jumlah fasilitas sebanyak 25 jenis fasilitas, kecamatan walenrang berada di (orde II) dengan ketersediaan fasilitas sebanyak 21. Walenrang utara dengan ketersediaan fasilitas sebanyak 16 (orde III), kecamatan walenrang timur dengan fasilitas sebanyak 14 (orde IV) dan kecamatan yang memiliki ketersediaan sarana pelayanan publik yang paling sedikit berada di kecamatan walenrang barat (orde V).

Berdasarkan hasil perhitungan indeks sentralitas terbobot diperoleh informasi bahwa ada satu jenis fasilitas yang memiliki nilai bobot 50 yaitu terminal bus, dimana keberadaan jenis fasilitas ini hanya terdapat pada kecamatan belopa utara dan bajo. Nilai bobot sentralitasnya tinggi karena fungsi pelayanan kedua terminal ini melayani secara keseluruhan masyarakat di kabupaten luwu. Selain itu, jenis fasilitas yang memiliki nilai bobot 33.33 adalah hotel, karena hanya terdapat pada 3 kecamatan yaitu belopa, belopa utara dan larompong. Nilai bobot sentralitas 20 hanya terdapat pada kecamatan belopa, belopa utara, sulis, larompong dan larompong selatan. Nilai bobot sentralitas yang tinggi tidak terdapat pada wilayah calon DOB Luwu tengah.

Tabel 23. Jenis fasilitas berdasarkan derajat penyebarannya

Derajat penyebaran	Fasilitas		
≥70 % (tinggi)	Masjid	Pustu	
	Mushollah	posyandu	
	Gereja	poskesdes	
		puskesmas	
	TK	pasar	
	Sekolah Dasar	pertokoan	
	SLTP		
	35 % - 70 % (sedang)	MI	Dokter praktek
		RA	apotek
		MTS	
SMA		Bank	
SMK		koperasi	
MA		objek wisata	
≤35 % (rendah)	Wisma	Vihara	
	Hotel	Pura	
	Kantor pos		
	Terminal bus	Perguruan tinggi	
	Rumah sakit		

Berasarkan tabel di atas, sarana yang menempati peringkat pertama dari jumlah unit yang dihitung pada semua kecamatan dengan penyebaran 100 % atau tersedia di 22 kecamatan adalah sarana ibadah berupa masjid, sarana kesehatan yaitu posyandu, pustu dan puskesmas dan sarana pendidikan yaitu Sekolah dasar, TK dan SLTP. Sementara

untuk unit fasilitas yang tidak terdapat di kabupaten luwu yaitu sarana ibadah berupa pura dan Vihara, Dibandingkan dengan wilayah calon DOB luwu tengah dari keseluruhan unit yang diidentifikasi, terdapat 13 unit yang memiliki derajat penyebaran $\geq 70\%$, terdapat 7 unit fasilitas dengan sebaran 35-70% dan terdapat 12 unit $\leq 35\%$. Unit fasilitas yang tidak ada di wilayah calon DOB luwu tengah adalah Rumah sakit, terminal bus, pura, vihara, hotel dan wisma.

Tabel 24. Derajat penyebaran unit fasilitas DOB Luwu Tengah

Derajat penyebaran	Fasilitas		
$\geq 70\%$ (tinggi)	Masjid	Pustu	
	Mushollah	posyandu	
	Gereja	poskesdes	
		puskesmas	
	TK	pasar	
	Sekolah Dasar	pertokoan	
	SLTP	koperasi	
	35% - 70% (sedang)	MI	Dokter praktek
		MTS	
		SMA	Bank
SMK		objek wisata	
$\leq 35\%$ (rendah)	RA		
	Madrasah Aliyyah		
	Perguruan tinggi		
	Wisma	Vihara	
	Hotel	Pura	
	Kantor pos		
	Terminal bus		
	Rumah sakit		
	Apotik		

Analisis Fiskal kabupaten luwu

Belanja APBD dialokasikan dalam pelaksanaan program pemerintah daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Program yang dibiayai dari sumber – sumber penerimaan diharapkan dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan serta pembangunan di berbagai sektor. Dengan belanja APBD yang berkualitas, diharapkan dapat menjadi injeksi untuk mengoptimisasi sumber – sumber penerimaan atau nilai tambah bagi pendapatan daerah (PAD). Oleh karena itu, perencanaan dan penganggaran yang baik akan menjadi kunci untuk menyiasati penganggaran di daerah.

Tabel 25. Ringkasan keadaan calon DOB Luwu tengah

Kecamatan	Luas wilayah	Jumlah penduduk	Skalogram	IS	Lq > 1
Walenrang	94,6 km ²	19424	II	IV	Sektor pertanian padi sawah
walenrang timur	63,65 km ²	15734	IV	V	Sektor perikanan Perikanan budidaya
lamasi timur	57,65 km ²	12455	IV	V	Sektor perkebunan Kelapa dalam,kopi,sagu dan aren
walenrang utara	259,77 km ²	18391	II	V	Sektor peternakan Sapi
walenrang barat	257,13 km ²	9603	V	V	potong,kerbau,itik dan babi
Lamasi	42,2 km	20.983	I	III	

Dilihat dari potensi dan keadaan kecamatan saat ini, kebijakan perencanaan ruang belum optimal terlaksana. Dari hasil analisis skalogram, indeks sentralitas. Kecamatan lamasi dengan jumlah penduduk terbanyak, keberadaan fasilitas dan fungsi fasilitas lebih di atas dibandingkan dengan kecamatan walenrang. Sementara itu, kecamatan walenrang utara yang memiliki wilayah yang jauh lebih luas dari kecamatan lainnya hanya dipersiapkan sebagai wilayah yang berfungsi sebagai pusat pelayanan desa. Padahal wilayah ini memiliki banyak sektor – sektor unggulan yang menopang kegiatan usaha pertanian pada wilayah calon DOB Luwu tengah.

Simpulan Dan Saran

Hasil penelitian yang telah dilakukan Secara umum, wilayah calon DOB Luwu tengah memiliki potensi sumber daya yang kaya di sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan. Produksi pada beberapa jenis komoditi di enam kecamatan telah mampu memenuhi kebutuhan pasar di wilayahnya dan mampu melakukan ekspor dalam jumlah yang cukup besar, Dengan potensi besar ini, calon DOB luwu tengah berpeluang mengembangkan wilayahnya sebagai daerah yang sejahtera. Keterbatasan sarana dan prasarana pada wilayah calon DOB luwu tengah menjadi kendala utama bagi masyarakat di wilayah ini mengakses berbagai pelayanan pemerintah. Derajat desentralisasi yang rendah dengan pola hubungan instruktif dan tingkat kemandirian keuangan yang sangat rendah, menyebabkan pemerintah daerah kabupaten luwu tidak mampu membiayai program pengembangan daerah secara menyeluruh, khususnya pemerataan pembangunan. Strategi pengembangan wilayah dalam kerangka pembentukan daerah otonomi baru luwu tengah adalah dengan mendorong prioritas pembangunan.

Beberapa saran yang direkomendasikan adalah Pemerintah kabupaten luwu perlu mendorong pengembangan pada sektor pertanian (pertanian,peternakan,perkebunan dan

perikanan) sebagai upaya mendorong pembangunan ekonomi dan juga mengidentifikasi potensi – potensi ekonomi lainnya dalam rangka meningkatkan pendapatan Asli Daerah dan kesejahteraan masyarakat. Upaya pembangunan pada potensi sumber daya yang ada di wilayah calon DOB Luwu tengah perlu didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, khususnya pada kecamatan walenrang barat dan walenrang utara yang memiliki produksi beberapa jenis komoditi unggulan. Rencana pemekaran DOB Luwu tengah perlu dari awal mengkaji potensi – potensi sektor yang ada di wilayah tersebut dengan dukungan kajian yang lebih komprehensif. Pembentukan daerah otonomi baru luwu tengah mesti dilihat dari orientasi kesejahteraan, termasuk kabupaten induk (kabupaten Luwu) jika wilayah ini terpisah. Perlu adanya penelitian lanjutan yang melihat dari aspek politik, hukum, budaya, kelembagaan dan dukungan kebijakan. Hal ini sebagai penunjang informasi bagi pemerintah kabupaten luwu dan masyarakat pada umumnya melihat kerangka pembentukan daerah otonomi baru, dalam hal ini terkait kesejahteraan, pelayanan, daya saing, kemandirian dan keberlanjutan di wilayah DOB luwu tengah dan kabupaten induknya.

Referensi

- BAPPENAS. (2015). Modul Penghitungan Indeks Pembangunan Desa. Jakarta.
- BAPPENAS bekerja sama dengan UNDP. (2007). Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah. BRIDGE. Jakarta.
- Prasetya, A. H., dan Tasik, H. H. D. (2017). Analisis Dampak Variabel Keuangan Saham terhadap Keluar–Masuknya Saham Di LQ-45 (Periode 2014-2015). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).
- Sjafrizal. (2018). *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi (Cetakan Ti)*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.
- Sudarmono, M. (2006). *Analisis Transformasi Struktural, Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Antar Daerah Di Wilayah Pembangunan I Jateng*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sudarsih, E. (2008). *Kajian Konsep Sustainable Farming dalam Pembangunan Sektor Pertanian*. *Jurnal Sosial Humaniora*.